

Realita Penerapan Kebijakan Fiskal Dan Moneter Di Indonesia Dan Permasalahannya

A. Ika Fahrika, Aisyah Ashari, Sultan Ansar

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email : Ikafahrika05@gmail.com,aisyahashari2002@gmail.com, asrultan41@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia Permasalahan pada jurnal ini mengenai pemberlakuan kebijakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena sosial yang ada. Pada penelitian ini menggunakan referensi buku dan jurnal artikel yang terkait dengan pembahasan dalam jurnal ini.

Di Indonesia, pemerintah dan bank sentral berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan dalam hal fiskal dan moneter yang memiliki pengaruh pada stabilitas keuangan, inflasi, ataupun pertumbuhan di bidang ekonomi. Penerimaan ataupun pengeluaran negara, yang diatur dalam undang-undang Anggaran Pembangunan Belanja Negara, serta langkah-langkah perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, merupakan beberapa kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, BI memberlakukan kebijakan dibidang moneter di Indonesia dengan alat-alat seperti suku bunga, giro wajib, dan operasi pasar terbuka. Namun, terdapat beberapa kendala pada pemberlakuan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif di Indonesia, antara lain kurangnya koordinasi antara pemerintah dan bank sentral serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya stabilitas keuangan dan hasil dari kebijakan fiskal dan moneter. kebijakan moneter. Maka, perlunya pembenahan yang sistematis guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Keywords: Kebijakan, Fiskal, Moneter.

Abstract

This journal discusses Indonesia's Fiscal and Monetary Policy. The problem in this journal is regarding policy enforcement. The type of research used is library research. This study uses a qualitative approach with the aim of examining more deeply the existing social phenomena. In this research using reference books, journal articles and lecture material related to the discussion in this journal.

In Indonesia, the government and the central bank collaborate to create policies in fiscal and monetary terms that have an impact on financial stability, inflation, or growth in the economic sector. State revenues or expenditures, which are regulated in the Law on the State Expenditure Development Budget, as well as tax measures to increase state revenues, are some of the fiscal policies that apply in Indonesia. In contrast, BI enforces monetary policy in Indonesia with tools such as interest rates, statutory reserves, and open market operations. However, there are several obstacles to the implementation of effective fiscal and monetary policies in Indonesia, including the lack of coordination between the government and the central bank and the lack of public awareness of the importance of

financial stability and the results of fiscal and monetary policies. monetary policy. Thus, there is a need for systematic reforms to encourage public participation in sustainable Indonesian economic development.

Keywords: Policy, Fiscal, Monetary.

Pendahuluan

Untuk mencapai tujuan ekonomi makro, kebijakan moneter bekerja dengan tujuan membangun untuk menyeimbangkan internal (meninggikan pertumbuhan dalam hal ekonomi, menstabilkan harga, meratakan pembangunan) dan menyeimbangkan eksternal atau neraca pembayaran. Prospek lapangan pekerjaan, menstabilkan pekerjaan, dan neraca pembayaran luar negeri yang menguntungkan adalah semua indikator atau patokan stabilitas ekonomi. Kebijakan dalam moneter dapat digunakan untuk memulihkan stabilitas jika kegiatan ekonomi terganggu (langkah-langkah stabilisasi). Industri keuangan pada awalnya akan merasakan dampak dari kebijakan moneter, yang kemudian menyebar ke ekonomi riil.

Suatu hal yang paling menarik ketika membicarakan ekonomi adalah mengenai inflasi, menurut Amrini et al., terutama mengingat akibat yang luar biasa terhadap tumbuh kembangnya ekonomi Indonesia. Dengan peningkatan yang terus menerus bertambah dalam tingkat harga rata-rata disebut sebagai inflasi. Bergantung pada seberapa parahnya, inflasi dapat berdampak baik atau negatif terhadap perekonomian. Negara berkembang dengan basis ekonomi agraris, seperti Indonesia, lebih cenderung mengalami inflasi. Kegagalan atau guncangan lokal akan mengakibatkan perubahan harga di pasar dalam negeri dan inflasi ekonomi.

Menurunnya jumlah tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai 14 Agustus 1997 turut menyumbang inflasi Indonesia. Karena Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang (disebut juga kurs

mengambang bebas), harga tukar rupiah akan ditentukan seluruhnya oleh mekanisme pasar atau oleh hukum penawaran ataupun permintaan dalam pasar. Jumlah ekspor meningkat akibat devaluasi rupiah terhadap mata uang lain. Barang-barang domestik yang lebih murah menarik pembeli internasional, meningkatkan permintaan barang-barang tersebut dan menyebabkan harga naik secara bertahap dan inflasi.

Inflasi dipengaruhi oleh perekonomian Indonesia dan sebaliknya. pada analisis ekonomi makro, dimana produk domestik bruto sering dianggap sebagai indikator kinerja ekonomi yang sangat baik. Prospek pekerjaan yang tinggi selama periode ekspansi ekonomi yang cepat menyebabkan tingkat pendapatan yang tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan pengeluaran yang lebih besar daripada kemampuan ekonomi untuk menghasilkan produk dan jasa. Inflasi akan dihasilkan dari pengeluaran yang boros ini. Di sisi lain, perekonomian Indonesia menderita ketika terjadi inflasi yang tinggi.

Dalam menentukan baik atau buruknya ekonomi suatu Negara ada beberapa indikator yang dapat digunakan. Tingkat pengangguran adalah salah satunya. Situasi ketenagakerjaan di Indonesia semakin parah sejak krisis ekonomi di pertengahan tahun 1997. Padahal pertumbuhan ekonomi dan masalah pengangguran saling terkait erat. Lapangan kerja akan hadir secara otomatis jika terjadi pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang terserap bisa meningkat 1% menjadi 400 ribu karyawan. Jika ekspansi ekonomi hanya mampu mempekerjakan lebih sedikit pekerja setiap tahunnya daripada jumlah lowongan kerja yang tersedia, jumlah pengangguran di Indonesia akan meningkat setiap tahun karena lebih sedikit orang yang mendapatkan pekerjaan.

Menurut Cioran, stabilitas harga—yang tercermin dari tingkat inflasi—merupakan tujuan utama kebijakan moneter. Menurut temuan penelitiannya, ada beberapa hubungan positif yang setara antara suku bunga dan inflasi, namun pengangguran memiliki hubungan buruk (negative) terhadap inflasi suatu negara. Kajiannya berjudul Kebijakan Ekonomi Moneter, Pengaruh dan Hubungan Kausal antara Inflasi dan Beberapa Variabel Ekonomi Makro. Pada penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai kebijakan fiskal dan moneter Indonesia dengan berfokus pada aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah Indonesia, perpajakan dan pengeluaran sebagai kebijakan fiskal, dan jenis-jenis kebijakan moneter Indonesia.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendalami suatu fenomena sosial. Buku, jurnal, artikel, dan catatan kuliah yang dikumpulkan untuk penelitian ini digunakan sebagai literatur perpustakaan. penelitian ini memanfaatkan literatur (perpustakaan) dari studi sebelumnya, bentuk studi ini dilakukan di perpustakaan. Untuk menanggapi pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, pendekatan tinjauan literatur sistematis ini mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua temuan pada topik penelitian.

Pembahasan

1. Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Indonesia

Kebijakan fiskal merupakan strategi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara agar dapat memberikan dampak jangka panjang dan jangka pendek terhadap kegiatan ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter adalah strategi yang digunakan oleh bank

sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian agar berdampak jangka pendek terhadap aktivitas perekonomian.

Implementasi Legislatif dan eksekutif menerapkan kebijakan fiskal melalui pilihan anggaran dan undang-undang yang berdampak pada pajak dan pengeluaran pemerintah. Bank sentral menerapkan kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya. Tujuan Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan stabilitas anggaran.

Pengeluaran pemerintah merupakan komponen dari permintaan agregat. Tentu saja, negara tidak hanya membelanjakan uang, tetapi juga menghasilkan pendapatan. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah termasuk dalam konsep gabungan anggaran suatu negara. Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (government revenue and expenditure) disebut kebijakan fiskal.(Pratama Rahardja dan Mandala Manurung:2008)

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi atau ke keadaan yang lebih baik atau diinginkan dengan mengubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan perekonomian dan tujuan utamanya adalah menstabilkan nilai rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dari kata kunci tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah upaya atau tindakan bank sentral sebagai pembuat

kebijakan untuk mempengaruhi variabel moneter guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. (Republik Indonesia, UU No. 3 tahun 2004 pasal 7)

Ketika Depresi Hebat melanda banyak negara pada tahun 1930-an, kebijakan moneter terbukti tidak mampu mengatasi situasi ekonomi. Kebijakan fiskal pada awalnya hanya terfokus pada apa yang sedang terjadi saat itu, yaitu menangani pengangguran. Setelah Perang Dunia II, kebijakan fiskal juga digunakan untuk mengatasi kondisi inflasi.

Inflasi adalah fenomena ekonomi murni, kecenderungan harga naik. Sampai batas tertentu, kita masih dapat menganalisis penyebab inflasi secara khusus dari perspektif ekonomi, dan mencari tahu alasan "ekonomi objektif" ini mungkin bukan hal yang paling sulit. Namun dalam praktiknya, mengidentifikasi penyebab inflasi (terutama inflasi kronis atau jangka panjang) dan merumuskan serta menerapkan penanggulangan merupakan masalah yang sulit dan kompleks. Namun dalam hal ini penulis akan menggunakan kebijakan fiskal yaitu belanja pegawai dan belanja kesejahteraan sebagai tolok ukur untuk melakukan penelitian untuk mengkaji inflasi.

Tanggung jawab utama pemerintah adalah mendukung kegiatan perekonomian daerah melalui pengelolaan keuangan yang sehat, yang meliputi pengendalian penerimaan pajak sebagai penerimaan pemerintah dan pengendalian belanja daerah seefektif mungkin untuk memerangi inflasi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini karena inflasi di Indonesia telah menjadi peristiwa tahunan. Inflasi sendiri merupakan salah satu tantangan untuk memajukan pembangunan ekonomi

suatu negara, dan tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi di setiap lokasi.

Pada tahun 1997–1998, krisis ekonomi Indonesia berakhir, sementara pada saat yang sama terjadi perubahan moneter yang signifikan. Ini mencoba untuk membangun kembali nama baik bank sentral, dimana mengalami penderitaan selama masa krisis. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah (eksekutif) maupun DPR (legislative) mendesak untuk merancang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI yang memberikan kontribusi dalam independensi kepada BI. Membandingkan undang-undang ini dengan undang-undang No. 13 tahun 1968, yang berdampak pada kebijakan moneter, ada dua perubahan besar. Hal awal yang menjadi tugas dari BI adalah untuk menjaga dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa BI harus memilih target inflasi setiap tahun kalender untuk melaksanakan kebijakan moneternya. Revisi UU No. 3 Tahun 2004 mengubah tujuan inflasi yang ditetapkan BI tersebut, yang mengharuskan pemerintah untuk menetapkan target inflasi setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia.(Riswanto Sembiring:2010)

Pertukaran antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, bagaimanapun, bukanlah hal yang sederhana dalam kehidupan nyata. Karena eratnya hubungan antara suku bunga dengan konsumsi masyarakat, produksi, dan investasi, penggunaan suku bunga sebagai tujuan operasional kebijakan moneter terkadang dapat menempatkan Bank Indonesia pada situasi yang sulit.

Salah satu komponen biaya baik produksi dan investasi (biaya modal) maupun konsumsi masyarakat (kredit konsumtif) adalah suku bunga. Faktanya, kebijakan fiskal dapat mempersulit pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran. Untuk mengurangi penjualan antara pada salah satu sisi ataupun mendorong tumbuhnya ekonomi di sector riil di lain sisi, sangat penting untuk membangun kerangka kerja sama antara kedua otoritas tersebut.

2. Perpajakan dan Pengeluaran Sebagai Bagian dari Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan strategi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara agar dapat memberikan dampak jangka panjang dan jangka pendek terhadap kegiatan ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter adalah strategi yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian agar berdampak jangka pendek terhadap aktivitas perekonomian.

Implementasi Legislatif dan eksekutif menerapkan kebijakan fiskal melalui pilihan anggaran dan undang-undang yang berdampak pada pajak dan pengeluaran pemerintah. Bank sentral menerapkan kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya. Tujuan Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan stabilitas anggaran.

Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah (dalam bentuk pajak). Alat kebijakan fiskal yang paling penting adalah pajak

dan subsidi. Jika pemerintah menjalankan kebijakan anggaran defisit (pengeluaran > pendapatan), maka permintaan agregat akan meningkat karena untuk menjalankan kebijakan anggaran defisit, pemerintah harus mengurangi pendapatan dengan menurunkan pajak dan/atau meningkatkan pengeluaran. Namun pada gilirannya, ketika pemerintah menjalankan kebijakan surplus anggaran, pemerintah harus meningkatkan pendapatan dengan menaikkan pajak dan/atau memangkas pengeluaran.

Pajak adalah aliran pendapatan terbesar bersama dengan pendapatan minyak dan gas. Baik bisnis maupun rumah tangga harus membayar pajak untuk sebagian atau seluruh kegiatan yang mereka lakukan. Pajak yang dibayarkan diperuntukkan bagi pembangunan negara. Kebijakan perpajakan pemerintah selalu diperbaharui dari waktu ke waktu yang disebut dengan reformasi perpajakan.

Pelaksanaan reformasi pajak oleh pemerintah merespon tren masyarakat termasuk peningkatan pendapatan. Kebijakan fiskal merupakan salah satu justifikasi intervensi pemerintah untuk memberikan pengaruh dalam pengembangan ataupun kegiatan ekonomi. Upaya pemerintah dalam memperbaiki pajak ataupun pengeluaran pemerintah maka yang dilakukan adalah mengeluarkan kebijakan dalam hal fiskal. Dalam kebijakan mengenai fiskal suatu hal yang menjadi variabel utama adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Fungsi dari kebijakan diatas untuk memberikan kestabilan mengenai permintaan agregat dan produktivitas. Kebijakan moneter yang tersedia meliputi anggaran defisit, anggaran surplus, dan anggaran berimbang.

Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2006-2015 merupakan salah satu contoh langkah nyata yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus secara hati-hati memeriksa pengeluaran publik mereka untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut tepat sasaran. Kesulitan tersebut di atas merupakan bukti kebangkitan dan keberhasilan kebijakan pajak yang dimulai pada tahun 1981. Pemerintah melaksanakan reformasi ini karena sangat yakin bahwa ketergantungan pada bantuan luar negeri dan pendapatan minyak akan turun drastis pada Pelita yang akan datang, terutama dari Pelita V atau 1989–1990 hingga 1993–1994 dan intensifikasi pengumpulan pajak non-minyak yang sejalan. (IWayan Sudirman ;2012)

Karena penerimaan dalam negeri lainnya, seperti minyak, bergantung pada pasar internasional dan peraturan OPEC dan penerimaan ekspor nonmigas juga bergantung pada kebijakan kuota impor, pungutan impor, dumping, dan undang-undang lainnya, maka pemerintah sangat bergantung pada penerimaan dalam negeri dalam bentuk pajak. Dalam konteks ekonomi, kebijakan pajak bisa fleksibel atau elastis.

Reformasi perpajakan meliputi aspek penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan utilitas ekonomi, peningkatan keadilan, pemerataan beban, peningkatan kepatuhan

perpajakan, peningkatan administrasi perpajakan dengan kepastian hukum, pemberian kemudahan dan pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Sebenarnya, reformasi pajak kedua dilaksanakan pada tahun 1994 dan terjadi jauh sebelum periode reformasi pajak nasional pertama, yang berlangsung dari tahun 1983 hingga 1985. (Munrokhim Misanam:2009)

3. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan fiskal merupakan strategi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara agar dapat memberikan dampak jangka panjang dan jangka pendek terhadap kegiatan ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter adalah strategi yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian agar berdampak jangka pendek terhadap aktivitas perekonomian.

Implementasi Legislatif dan eksekutif menerapkan kebijakan fiskal melalui pilihan anggaran dan undang-undang yang berdampak pada pajak dan pengeluaran pemerintah. Bank sentral menerapkan kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya. Tujuan Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan stabilitas anggaran.

Kebijakan Cadangan Wajib Jumlah cadangan yang harus dipertahankan bank dalam bentuk uang tunai atau surat berharga diatur oleh kebijakan moneter yang dikenal sebagai kebijakan cadangan wajib. Strategi ini mencoba

untuk mengurangi likuiditas pasar dan menahan ekspansi jumlah uang beredar dalam perekonomian.

Kebijakan Pembelian Sekuritas Kebijakan moneter yang dikenal sebagai kebijakan pembelian sekuritas mensyaratkan bank sentral membeli sekuritas dari bank atau entitas keuangan lainnya. Strategi ini mencoba untuk meningkatkan likuiditas pasar dan mendorong ekspansi ekonomi. Kebijakan Pertukaran Mata Uang Kebijakan nilai tukar adalah jenis kebijakan moneter yang mengontrol seberapa banyak mata uang suatu negara akan ditukar dengan negara lain.

a. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy)

Strategi untuk meningkatkan jumlah uang beredar dikenal sebagai kebijakan moneter ekspansif. Pendekatan ini diterapkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan permintaan masyarakat umum. Ketika terjadi resesi atau depresi dalam perekonomian, kebijakan ini diberlakukan. Kebijakan moneter yang longgar (atau mudah) ini terkadang disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Taktik berikut digunakan untuk mencapai kebijakan ini:

- 1) Politik diskonto (suku bunga lebih rendah),
- 2) Politik pasar terbuka (membeli sekuritas seperti saham dan obligasi),
- 3) Politik rasio kas (lebih sedikit uang tunai), dan
- 4) Politik kredit selektif (pemberian kredit longgar).

b. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy)

Kebijakan yang menurunkan jumlah uang beredar dikenal sebagai kebijakan moneter kontraktif. Ketika ada inflasi dalam perekonomian,

pendekatan ini diterapkan. Kebijakan uang ketat dan kebijakan moneter kontraktif adalah sinonim. Taktik berikut dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan ini:

- 1) Politik diskonto (meningkatkan suku bunga),
- 2) Politik pasar terbuka (menjual sekuritas),
- 3) Politik rasio kas (meningkatkan cadangan kas), dan
- 4) Politik kredit selektif (pengetatan pemberian kredit).¹

4. Pemasalahan penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia

Terkadang kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah untuk tidak efektif untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi di Indonesia. Misalnya saja ketika terjadi inflasi atau terjadinya kenaikan harga-harga secara keseluruhan yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun, maka pemerintah biasa mengambil kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat atau *tight money policy* atau penerapan uang ketat agar tidak terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah menempuh kebijakan politik diskonto, jual beli surat berharga dan lain-lain, tetapi politik yang diambil terkadang tidak efektif sehingga perlu mix antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tidak efektifnya kebijakan-kebijakan yang ditempuh bisa juga disebabkan karena adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa.

Kesimpulan

¹I Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter (Teori dan Empirikal)*, (Cet.II; Kencana: Jakarta, 2012), h.17-18

Salah satu komponen permintaan agregat adalah pengeluaran pemerintah. Tentu saja, pemerintah menghasilkan pendapatan selain membelanjakan uang. Konsep terpadu penerimaan dan pengeluaran negara meliputi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah (government revenues and expenditures).

Tujuan pokok dari kebijakan moneter, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia, adalah kestabilan nilai rupiah. Ini adalah salah satu strategi untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Menurut pernyataan ini, kebijakan moneter mengacu pada upaya atau tindakan Bank Sentral sebagai pembuat kebijakan untuk mempengaruhi variabel moneter dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua kategori kebijakan ekonomi yang sangat penting dan saling terkait. Di Indonesia, pemerintah dan bank sentral berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan moneter dan fiskal yang berdampak pada stabilitas keuangan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan dan pengeluaran negara, yang diatur dalam undang-undang APBN, serta langkah-langkah perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, merupakan beberapa kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter di Indonesia melalui alat-alat seperti suku bunga, giro wajib, dan operasi pasar terbuka.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif di Indonesia, antara lain kurangnya koordinasi antara pemerintah dan bank sentral serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya stabilitas keuangan dan hasil dari kebijakan fiskal dan moneter. kebijakan moneter. Oleh karena itu, masih banyak yang harus dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Manurung, Pratama Rahardja dan Mandala. *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi & makroekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta, 2008.

Misanam, Munrokhim. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Republik Indonesia, UU No. 3 tahun 2004 pasal 7.

Sembiring, Riswanto. *Bauran kebijakan*. FE UI: 2010.

Sudirman, I Wayan. *Kebijakan Fiskal dan Moneter (Teori dan Empirikal)*. Cet II: 2; Kencana: Jakarta, 2012.